

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

(Studi : Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

SINTIA PUTRI

2110111146

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Ferdi, S.H.,M.H

Dewi Enggriyeni, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

	No. Alumni Universitas		Sintia Putri		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Lubuk Nagodang/24 Juni 2003	f. Tanggal Lulus		: 21 Agustus 2026	
	b. Nama Orang Tua	: Iwan Amri Desra Mira	g. Predikat Lulus		: Sangat Memuaskan	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi		: 5 Tahun	
	d. PK	: Hukum Internasional	i. IPK		: 3,53	
	e. NIM	: 2110111146	j. Alamat		: Kerinci Regency, Siulak District, Lubuk Nagodang Village.	

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS
PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
(Studi : Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat)**

(Sintia Putri, 2110111146, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 120 Halaman, 2026)

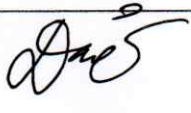
ABSTRAK

Pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat yang berkaitan dengan sumber daya genetik tumbuhan meliputi varietas padi lokal, kopi arabika, dan tanaman obat rentan terhadap praktik biopiracy akibat belum optimalnya sistem perlindungan hukum yang ada. Persoalan mendasar yang diidentifikasi adalah ketidaksinkronan paradigma antara pengakuan kedaulatan negara atas sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992 Pasal 3 dan 15, dengan pengakuan hak komunal masyarakat adat yang tertuang dalam CBD Pasal 8(j), Protokol Nagoya 2010, UNDRIP 2007, dan Konvensi ILO No. 169; serta tumpang tindih pada tingkat nasional antara pendekatan individual Undang-Undang Paten dengan pendekatan komunal Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan rumusan masalah: (1) pengaturan kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tumbuhan dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional; serta (2) bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif bagi masyarakat hukum adat Minangkabau beserta kendala efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan sinkronisasi antara rezim kedaulatan negara dan rezim hak komunal, serta antara pendekatan individual UU Paten dan pendekatan komunal PP 56/2022. Perlindungan preventif melalui inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal, serta perlindungan represif melalui mekanisme keberatan dan pembatalan paten, belum berjalan efektif akibat tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan rendahnya kapasitas hukum masyarakat adat dalam mengakses sistem hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor dan penguatan mekanisme ABS yang operasional bagi masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik Tumbuhan, Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

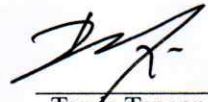
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 21 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	Sri Oktavia, SH.,M.Sc.,Ph.D.	Dayu Medina, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Sintia Putri	No. Alumni Faculty	
	a. Place/Date of Birth	: Lubuk Nagoya/June 24, 2003	f. Graduation Date	: August 21, 2026
	b. Parent Name	: Iwan Amri Desra Mira	g. Pass Predicate	: Very Satisfactory
	c. Faculty	: Law	h. Length of Study	: 5 Years
	d. Concentration	: International Law	i. GPA	: 3,53
	e. NIM	: 2110111146	j. Address	: Kerinci Regency, Siulak District, Lubuk Nagodang Village.

LEGAL PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY ON TRADITIONAL KNOWLEDGE RELATED TO PLANT GENETIC RESOURCES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW
(Study: On the Customary Law Community of Minangkabau in West Sumatra)

(Sintia Putri, 2110111146, Faculty of Law, Andalas University, 120 Pages, 2026)

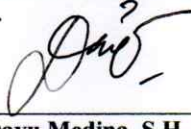
ABSTRACT

The traditional knowledge of the Minangkabau indigenous legal community in West Sumatra regarding plant genetic resources including local rice varieties, arabica coffee, and medicinal plants remains vulnerable to biopiracy practices due to the inadequacy of existing legal protection systems. The fundamental problem identified is a paradigmatic misalignment between the recognition of state sovereignty over genetic resources under the Convention on Biological Diversity (CBD) 1992, Articles 3 and 15, and the recognition of indigenous communal rights as stipulated in CBD Article 8(j), the Nagoya Protocol 2010, UNDRIP 2007, and ILO Convention No. 169; further compounded at the national level by the conflict between the individual-oriented approach of the Patent Law and the communal approach of Government Regulation No. 56 of 2022 on Communal Intellectual Property. This study aims to analyze: (1) the regulation of communal intellectual property over traditional knowledge related to plant genetic resources within the framework of international and national law; and (2) the forms of preventive and repressive legal protection available to the Minangkabau indigenous legal community and the obstacles to their effective implementation. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach using statutory and conceptual frameworks, analyzed qualitatively through primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal a synchronization gap between the state sovereignty regime and the communal rights regime, as well as between the individual approach of the Patent Law and the communal approach of Government Regulation No. 56/2022. Preventive protection through inventorization and registration of communal intellectual property, and repressive protection through patent objection and invalidation mechanisms, have not been effectively implemented due to overlapping institutional authority and limited legal capacity of indigenous communities to access the formal legal system. This study recommends crosssectoral regulatory harmonization and the strengthening of operational ABS mechanisms for the Minangkabau indigenous legal community in West Sumatra.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Traditional Knowledge, Plant Genetic Resources, Minangkabau Indigenous Legal Community*

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 21, 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Sri Oktavia, SH., M.Sc., Ph.D..	Dayu Medina, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of International Law: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Fakulty/University	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: